



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 03A/DPR RI/II/2013-2014

TENTANG  
PROGRAM LEGISLASI NASIONAL  
RANCANGAN UNDANG-UNDANG PRIORITAS  
TAHUN 2014

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Juncto Pasal 60 huruf a dan huruf b Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata Tertib, Juncto Pasal 40 ayat (5) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Program Legislasi Nasional, perlu menetapkan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2014;
  - b. bahwa menetapkan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2014 sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
  3. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Peraturan Tata Tertib;
  4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Program Legislasi Nasional;

Memperhatikan : Keputusan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ke 13 tanggal 17 Desember 2013;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG PROGRAM LEGISLASI NASIONAL RANCANGAN UNDANG-UNDANG PRIORITAS TAHUN 2014

**PERTAMA** : Menetapkan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2014 sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II Keputusan ini.

**KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Pimpinan DPR RI;
2. Ketua DPD RI;
3. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;
4. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional RI;
5. Ketua Komisi I sampai dengan XI DPR RI;
6. Ketua-Ketua Badan Alat Kelengkapan DPR RI;
7. Ketua Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Fraksi Partai Amanat Nasional, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Hanura;
8. Sekretaris Jenderal DPR RI;
9. Deputi Perundang-Undangan Sekretariat Jenderal DPR RI;
10. Deputi Persidangan dan KSAP Sekretariat Jenderal DPR RI;
11. Para Kepala Biro di Lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 17 Desember 2013  
KETUA,  
ttd

**DR. H. MARZUKI ALIE**

**PROGRAM LEGISLASI NASIONAL  
RANCANGAN UNDANG-UNDANG PRIORITAS  
TAHUN 2014**

<b>NO</b>	<b>JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG</b>	<b>DRAFT RUU DAN NA DISIAPKAN OLEH</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	RUU Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran	DPR	RUU dalam tahap Pembicaraan Tk. I di Komisi I
2	RUU tentang Perjanjian Internasional	DPR	RUU dalam tahap Pembicaraan Tk. I di Komisi I
3	RUU tentang Pemilihan Kepala Daerah	Pemerintah	RUU dalam tahap Pembicaraan Tk. I di Komisi II
4	RUU Tentang Pertanahan	DPR	RUU dalam tahap Pembicaraan Tk. I di Komisi II
5	RUU tentang Mahkamah Agung	DPR	RUU dalam tahap Pembicaraan Tk. I di Komisi III
6	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI	DPR	RUU dalam tahap Pembicaraan Tk. I di Komisi III
7	RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	Pemerintah	RUU dalam tahap Pembicaraan Tk. I di Komisi III
8	RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana	Pemerintah	RUU dalam tahap Pembicaraan Tk. I di Komisi III
9	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan	DPR	RUU dalam tahap Pembicaraan Tk. I di Komisi IV
10	RUU tentang Jalan	DPR	RUU dalam tahap Pembicaraan Tk. I di Komisi V
11	RUU tentang Perdagangan	Pemerintah	RUU dalam tahap Pembicaraan Tk. I di Komisi VI
12	RUU tentang Jaminan Produk Halal	DPR	RUU dalam tahap Pembicaraan Tk. I di Komisi VIII
13	RUU Tentang Tenaga Kesehatan	Pemerintah	RUU dalam tahap Pembicaraan Tk. I di Komisi IX

14	RUU Tentang Keperawatan	DPR	RUU dalam tahap Pembicaraan Tk. I di Komisi IX
15	RUU tentang Kesehatan Jiwa	DPR	RUU dalam tahap Pembicaraan Tk. I di Komisi IX
16	RUU tentang Pengurusan Piutang Negara dan Daerah	Pemerintah	RUU dalam tahap Pembicaraan Tk. I di Komisi XI
17	RUU Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian	Pemerintah	RUU dalam tahap Pembicaraan Tk. I di Komisi XI
18	RUU tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan	Pemerintah	RUU dalam tahap Pembicaraan Tk. I di Komisi XI
19	RUU tentang Keamanan Nasional	Pemerintah	RUU dalam tahap Pembicaraan Tk. I di Pansus
20	RUU Tentang Pengawasan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga	DPR	RUU dalam tahap Pembicaraan Tk. I di Pansus
21	RUU tentang Percepatan Pembangunan Daerah Kepulauan	DPR	RUU dalam tahap Pembicaraan Tk. I di Pansus
22	RUU tentang Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri	DPR	RUU dalam tahap Pembicaraan Tk. I di Pansus
23	RUU tentang Pemerintahan Daerah	Pemerintah	RUU dalam tahap Pembicaraan Tk. I di Pansus
24	RUU tentang Tabungan Perumahan Rakyat	DPR	RUU dalam tahap Pembicaraan Tk. I di Pansus
25	RUU Tentang Keinsinyuran	DPR	RUU dalam tahap Pembicaraan Tk. I di Pansus
26	RUU Tentang Pengakuan Dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat	DPR	RUU dalam tahap Pembicaraan Tk. I di Pansus
27	RUU tentang Kepalangmerahan	DPR	RUU dalam tahap Pembicaraan Tk. I di Pansus
28	RUU tentang Perubahan Harga Rupiah	Pemerintah	RUU dalam tahap Pembicaraan Tk. I di Pansus
29	RUU tentang Panas Bumi	Pemerintah	RUU dalam tahap Pembicaraan Tk. I di Pansus
30	RUU tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian	Pemerintah	RUU dalam tahap Pembicaraan Tk. I di Pansus
31	RUU Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara	DPR	RUU dalam tahap Pembicaraan Tk. I di Pansus

32	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.	DPR	RUU dalam tahap Pembicaraan Tk. I di Pansus
33	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.	Pemerintah	RUU dalam tahap Pembicaraan Tk. I di Pansus
34	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	DPR	RUU dalam tahap Pembicaraan Tk. I di Pansus
35	RUU Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi	DPR	Proses harmonisasi di Baleg
36	RUU Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi	DPR	Proses harmonisasi di Baleg
37	RUU tentang Pengelolaan Ibadah Haji	DPR	Proses harmonisasi di Baleg
38	RUU Tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga	DPR	Proses harmonisasi di Baleg
39	RUU Tentang Sistem Perbukuan Nasional	DPR	Proses harmonisasi di Baleg
40	RUU tentang Hukum Disiplin Militer	DPR	Proses harmonisasi di Baleg
41	RUU tentang Radio Televisi Republik Indonesia	DPR	RUU dan NA disiapkan oleh Komisi I
42	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia	DPR	RUU dan NA disiapkan oleh Komisi III
43	RUU tentang Konservasi Tanah dan Air	DPR	RUU dan NA disiapkan oleh Komisi IV
44	RUU Tentang Pencarian Dan Pertolongan	DPR	RUU dan NA disiapkan oleh Komisi V
45	RUU Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara	DPR	RUU dan NA disiapkan oleh Komisi VI
46	RUU tentang Kesetaraan Gender	DPR	RUU dan NA disiapkan oleh Komisi VIII
47	RUU Tentang Kebudayaan	DPR	RUU dan NA disiapkan oleh Komisi X
48	RUU Tentang Kawasan Pariwisata Khusus	DPR	RUU dan NA disiapkan oleh Komisi X
49	RUU Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan	DPR	RUU dan NA disiapkan oleh Komisi XI
50	RUU tentang Perubahan atas UU No. 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar.	DPR	RUU dan NA disiapkan oleh Komisi XI
51	RUU tentang Pertembakauan	DPR	RUU dan NA disiapkan oleh Badan Legislasi
52	RUU tentang Pengaturan Minuman Beralkohol	DPR	RUU dan NA disiapkan oleh Badan Legislasi

53	RUU tentang Perubahan atas UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan	DPR	RUU dan NA disiapkan oleh Badan Legislasi
54	RUU tentang Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	DPR	RUU dan NA disiapkan oleh Badan Legislasi
55	RUU tentang Perubahan atas UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI.	DPR	RUU dan NA disiapkan oleh Badan Legislasi
56	RUU tentang Etika Penyelenggara Negara	DPR	RUU dan NA disiapkan oleh Badan Legislasi
57	RUU tentang Perubahan atas UU No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat.	DPR	RUU dan NA disiapkan oleh Badan Legislasi
58	RUU tentang Pengelolaan Keuangan Haji	Pemerintah	RUU dan NA disiapkan oleh Kementerian Agama
59	RUU tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.	Pemerintah	RUU dan NA disiapkan oleh Kementerian Keuangan
60	UU tentang Administrasi Pemerintahan	Pemerintah	RUU dan NA disiapkan oleh Kementerian PAN dan RB
61	RUU tentang Rahasia Negara	Pemerintah	RUU dan NA disiapkan oleh Kementerian Pertahanan
62	RUU tentang Perampasan Aset Tindak Pidana.	Pemerintah	RUU dan NA disiapkan oleh Kementerian Hukum dan HAM
63	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban	Pemerintah	RUU dan NA disiapkan oleh Kementerian Hukum dan HAM
64	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.	Pemerintah	RUU dan NA disiapkan oleh Kementerian Keuangan
65	RUU tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun.	Pemerintah	RUU dan NA disiapkan oleh Kementerian Keuangan
66	RUU tentang Kelautan	DPD	RUU dan NA disiapkan oleh DPD

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 17 Desember 2013  
KETUA,  
ttt

**DR. H. MARZUKI ALIE**

LAMPIRAN II KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 03 A/DPR/II/2013-2014  
TANGGAL : 17 DESEMBER 2013

<b>DAFTAR RUU KUMULATIF TERBUKA</b>	
1	Daftar RUU Kumulatif Terbuka tentang Pengesahan Perjanjian Internasional
2	Daftar RUU Kumulatif Terbuka akibat Putusan Mahkamah Konstitusi
3	Daftar RUU Kumulatif Terbuka tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
4	Daftar RUU Kumulatif Terbuka tentang Pembentukan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota
5	Daftar RUU Kumulatif Terbuka tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Menjadi Undang-Undang

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 17 Desember 2013  
KETUA,  
ttd

**DR. H. MARZUKI ALIE**